SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : APBD Perubahan Mencapai Rp 1,29 Triliun

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Radar Bandung / Hal.5

Edisi : Rabu, 12 September 2018

APBD Perubahan Mencapai Rp 1,29 Triliun

BANDUNG -Pemprov Jawa Barat menyampaikan rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Jawa Barat di Tahun 2018 ini yang mengalami mencapai angka Rp1,29 Triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, Iwa Karniwa, mengatakan ada beberapa hal yang terkait dengan perubahan dikarenakan adanya target indikator yang ditetapkan untuk perubahan anggaran 2018.

"Saya memimpin langsung dan memaparkan gambaran umum terkait APBD Perubahan. Diantaranya ada perubahan asumsi pejabat umum dan juga khusus untuk di bidang pendapatan terjadinya pelampauan pembiayaan," ujar Iwa melalui siaran pers yang diterima, Rabu (11/9/2018).

Pemprov berencana melakukan pergeseran anggaran antar unit. Termasuk beberapa yang terkait dengan sisa

lelang, ini juga perlu dimanfaatkan dalam perubahan APBD ini agar lebih optimal dalam penggunaan APBD 2018 setelah perubahan.

Pihaknya juga menyampaikan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dilakukan dalam APBD P 2018 yaitu indeks pembangunan manusia ditargetkan antara 71% hingga 71,54%, lalu indeks pendidikan yang telah direncanakan sebesar 62,51% hingga 63,50%

dan beberapa hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi juga akan didorong antara 5,5% sampai dengan 5,9%, Inflasi 3,55 +1% dan terakhir untuk investasi ditargetkan Rp315 triliun sampai dengan Rp335,3 triliun.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan dari sisi pendapatan diantaranya adalah dengan memantapkan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi, koordinasi pusat

daerah, juga meningkatkan deviden BUMD, termasuk juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Terkait kebijakan belanja Pemerintah provinsi Jawa Barat akan mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib, non wajib, urusan pemerintahan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan.

Kemudian dilaksanakannya RPJMN 2015-2019, Sustainable Development Goals (SDGs), Good Governance, juga fungsi pendidikan 20% dari total, fungsi kesehatan 10% dari belanja, fungsi infrastruktur 10% dari total Pajak Kendaraan Bermotor, serta optimalisasi penggunaan aset daerah, dan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

"Itulah kira-kira kebijakan anggaran yang kita coba lakukan sehingga target pendapatan murni 2018 adalah Rp31,96 triliun, pada rencana perubahan dengan beberapa pening-

katan efisiensi, efektifitas dan lain sebagainya itu menjadi Rp33,25 triliun sehingga ada peningkatan Rp1,29 triliun. Di sisi belanja diusulkan Rp33,9 triliun direncanakan alokasi belanja Rp35,7 triliun sehingga ada peningkatan belanja Rp 1,7 triliun," jelas Iwa.

Sekda menuturkan dari APBD Murni 2018, anggaran perubahan mengalami kenaikan sebesar 5,25%. Salah satu kenaikan ini juga untuk menopang program quick response yang digagas oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul. "Program ini kami siapkan diperubahan karena akan segera diluncurkan," tutur Sekda.

Terkait kekurangan anggaran, Sekda memastikan hal ini bisa ditutup dari hasil Silpa perhitungan BPK yang mencapai Rp2,478 triliun. Pihaknya menargetkan pembahasan APBD Perubahan 2018 bisa tuntas menjelang akhir September sekaligus bisa ditetapkan. (bbb)

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Apartemen Rakyat Dituntaskan

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat /Hal 2

Edisi : Rabu, 12 September 2018

Apartemen Rakyat Dituntaskan

BANDUNG. (PR).-

Tertunda selama dua tahun anggaran, Pemerintah Kota Bandung manargetkan pembangunan apartemen rakyat tuntas dibangun akhir tahun ini. Program penyediaan hunian vertikal bagi warga berpenghasilan rendah belum memenuhi kebutuhan yang demikian besar.

Proyek apartemen rakyat di Rancacili yang menyedot dana APBD 2018 sebesar Rp 19 miliar baru saja memulai proses tender. Rumah susun pertama dengan fasilitas lift itu memiliki 278 unit kamar. Lelang tahun ini merupakan kelanjutan dari lelang dua tahun anggaran sebelumnya.

"Kami menargetkan proyek apartemen rakyat tuntas akhir tahun ini.

Tahun depan, setelah enam bulan masa perawatan, apartemen bisa segera ditinggali warga yang membutuhkan," kata Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertanahan (DPKP3) Kota Bandung Nunun Yanuarti, Selasa (11/9/2018) siang.

Ia menjelaskan, prioritas penempatan apartemen rakyat baru ini diberikan kepada ribuan warga berpenghasilan rendah yang telah terdaftar di Pemkot Bandung. Pemkot akan mengecek ulang data itu untuk memastikan kesiapan warga. Dalam catatan "PR", ada sekitar 3.000 warga miskin yang menyatakan minat masuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa), dalam daftar yang dibuat Pemkot pada kurun 2006-2009.

Selain daftar warga miskin yang sudah tercatat, masih ada ribuan warga berpenghasilan rendah yang tinggal di permukiman-permukiman padat di Kota Bandung.

Dalam data Pemkot pada 2016, terdapat 400-an titik kawasan kumuluh dengan cakupan seluas 30 hektare. Jumlah rumah tidak layak huni ketika itu tercatat 5.596 unit. Angka kekurangan rumah per 2010, berdasarkan data Dinas Tata Ruang mencapai 60.000 unit.

Nunun menjelaskan, Pemkot pada tahun ini menargetkan pembangunan dua rumah susun. Selain apartemen rakyat Rancacili, Pemkot juga mengejar target dimulainya pembangunan rumah deret Tamansari. Jika proyek apartemen rakyat tahun lalu terkendala masalah lelang, proyek rumah deret terkendala dinamika sosial yang melibatkan warga RW 11.

Selain apartemen rakyat, Pemkot masih memiliki satu proyek pembangunan rusunawa di kawasan Rancacili, disebut rusun silinder. Penuntasan pembangunan rusun silinder ditunda karena Pemkot memprioritaskan pendanaan bagi proyek apartemen rakyat.

Daya tampung

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Pemkot Bandung Bambang Suryawan menyatakan, apartemen rakyat di Rancacili bakal secara signifikan menambah daya tampung rusun yang dikelola oleh Pemkot Bandung. Artinya, semakin banyak warga berpenghasilan rendah yang akan terlayani. Ia pun memastikan prioritas penghuni apartemen rakyat akan diberikan kepada warga yang sudah masuk daftar tunggu.

"Kami melakukan verifikasi ulang. Warga yang masuk daftar tunggu itu yang akan jadi prioritas," ucapnya.

Dijelaskan Bambang, Pemkot Bandung sudah menetapkan besaran tarif sewa untuk setiap unit kamar yang ada di seluruh blok rusunawa di Rancacili, Cingised, dan Sadangserang. Besaran sewa termurah adalah Rp 145.000 per bulan. Yang tertinggi Rp 1 juta per bulan. **(Tri Joko Her Riadi)*****